



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A-5
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PPTK Jangan Sampai Diperiksa Penegak Hukum

BUKITINGGI-SINGGALANG

Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Sumbar mengunjungi pembangunan Balai Diklat Tenaga Penyuluh Pertanian di Bukittinggi. Gedung yang menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2017 tersebut sekarang masih terbengkalai.

Hasil temuan BPK, sekitar November 2017 itu ada kelebihan uang yang disetorkan kepada rekanan Rp43 juta. Total anggaran di 2017 itu sekitar Rp7,5 miliar.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Olyandes menjelaskan, temuan tersebut memang betul, cuma

sudah dibayar oleh rekanan ke negara. Temuan tersebut disebabkan oleh keterlambatan kontraktor menyelesaikan penimbunan lantai.

Saat BPK melakukan pemeriksaan lapangan, timbunan belum diratakan, atau masih teronggok-onggok. "Akhirnya setelah pemeriksaan BPK, pihak rekanan langsung mengerjakannya," ujarnya.

Tapi dalam mengerjakan sudah terhitung waktu keterlambatan dari kontrak kerja. Akibatnya, PT juga harus membayar denda keterlambatan sekitar Rp6,7 juta atau Rp5,1 juta per hari. "Jadi total uang yang dikembalikan tekanan sekitar Rp115 juta," katanya.

Ia menambahkan pengerjaan proyek tersebut

sudah tahun ke dua. 2018 ini adalah tahun ketiga. Di tahan ke tiga ini dianggarkan lagi Rp8 miliar. "Rp7,6 miliar untuk fisik," katanya.

Menurutnya dengan anggaran sebanyak itu, belum akan selesai sampai *finish*. Kemungkinan akan ada tahap keempat.

Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sumbar Muzli M. Nur, karena kontrak dengan rekanan sudah habis bagaimana lagi. Ke depan LPSE diminta untuk lebih selektif menentukan pemenang tender. Jangan cuma gara-gara yang menawarkan paling rendah dijadikan pemenang, akhirnya banyak masalah jadinya.

Sekretaris Komisi 2 Nofrizon, juga mengatakan hal yang sama. Bahkan ada tukang kerja bangunan

yang mengadu ke padanya karena gaji tidak dibayar. "Dikabarkan juga tukang kerja diganti tiap sebentar," katanya.

Dia mengingatkan KPA dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) agar hati-hati. Jangan sampai gara-gara salah menunjuk rekanan, mereka juga dipanggil penegak hukum.

Kunjungan tersebut juga diikuti oleh anggota Komisi 2 lainnya yakni Komi Chaniago, Sudarmi Saogo, Zusemawati.

Kondisi balai diklat itu sekarang sudah berbentuk. Sudah dipasang atap. Lantai masih tanah, plafon belum, sebagian dinding belum dipleset. Pintu-pintu ruangan belum ada. Menurut pihak balai hingga selesai akan menghabiskan anggaran Rp25 miliar. (402)